



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Agustus 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
: PENERBANGAN INDONESIA  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT UTAMA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HERMANA SOEGIJANTORO  
2. Jabatan : SEKRETARIS PERUSAHAAN  
3. NHK : 674219

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.005.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/90 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 539.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000  
2. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5E AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000  
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000  
4. MOTOR, VESPA VESPA SPRINT IGET 150ABS A/T / SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 144.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 535.752.347

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.223.752.347

**III. HUTANG** Rp. 720.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.503.752.347

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : BUMN/BUMD

**LEMBAGA** : PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA

**UNIT KERJA** : KANTOR CABANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KRISTANTO
2. Jabatan : GENERAL MANAGER CABANG MATSC
3. NHK : 441275

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **4.740.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/127 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 970.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/160 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/35 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/127 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 970.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/160 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/35 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
7. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **816.500.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
2. MOTOR, KYMCO SR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000



3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.  
3.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
415.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	193.684.648
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.075.924.935
Sub Total	Rp.	6.926.109.583

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.926.109.583

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Agustus 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : BUMN/BUMD

**LEMBAGA** : PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA

**UNIT KERJA** : DIREKTORAT OPERASI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MOEJI SOEBAGYO
2. Jabatan : KEPALA DIVISI PENGENDALIAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
3. NHK : 674080

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **4.330.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/96 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/187 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **537.500.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. MOTOR, HONDA ADX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.



33.000.000

5. MOTOR, UNITED T1800 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

28.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 72.500.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 1.349.867.454

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 42.200.000

**Sub Total**

Rp. 6.332.067.454

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 6.332.067.454

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.